



Pemkab Usul Tujuh Raperda

MELAWI, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten Melawi menyerahkan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk diproses lebih lanjut DPRD Melawi. Ini disampaikan Wakil Bupati Dadi Sunarya, ketika Sidang Paripurna DPRD, Selasa (20/9).

Tujuh Raperda yang diusulkan tersebut termasuk Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Melawi 2015.

Dijelaskannya, dalam laporan rancangan pengelolaan keuangan daerah sudah dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada 13 Mei hingga 14 Juni dan mendapat peridikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Raperda selanjutnya yakni tentang Perangkat Daerah. Raperda tentang Hari Jadi Kabupaten Melawi. Selanjutnya Raperda tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemkab Melawi.

Kemudian Raperda tentang Pengawasan Pengendalian Usaha Budi Daya Walet. Raperda Pajak Sarang Burung Walet dan terakhir Raperda tentang Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No 10 tentang Retribusi Pengelolaan Menara Telekomunikasi.

"Kita harapkan Raperda ini untuk selanjutnya dibahas oleh DPRD sesuai mekanisme dan menghasilkan aturan untuk kemaslahatan masyarakat,"ungkapnya.



TRIBUN/PRA

SIMBOLIS - Wakil Bupati Dadi Sunarya menyerahkan secara simbolis draft tujuh Raperda kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat Paripurna, Selasa (20/9).

Rapat dimulai pukul 10.00 WIB dipimpin Ketua DPRD Melawi Abang Tajudin dan dibuka Wakil DPRD Melawi, Klusen beserta 22 dewan dari 30 anggota DPRD Melawi. Hadir sejumlah unsur pimpinan SKPD, dan Forkopimda.

Wakil Ketua DPRD Melawi Klusen menegaskan keseluruhan Raperda menjadi sekala prioritas dan pihaknya bersama Pemda berkomitmen mengoptimalkan waktu yang tersisa menyelesaikan pembahasan sesuai target yang di tetapkan.

"Kita coba sesuai kemampuan kita bekerja sesuai target," ungkapny.

Kendati demikian DPRD

kata Klusen menyoroti beberapa hal, misalnya berkaitan Raperda tentang perangkat daerah, dimana ini juga terkait pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) baru Pemkab Melawi.

Pihaknya meminta agar Bupati terlebih dahulu mengembalikan posisi semula para pejabat yang dimutasi pada era PJ Bupati. Ini juga merupa hasil pansus DPRD Melawi yang belum ditindak lanjuti Bupati.

"Jika ini dikembalikan terlebih dahulu, baru kita proses pembahasan SOPD nya," ungkapny.

(zul)